

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian tentang diskriminasi gender dalam perusahaan Jepang di bidang industri pada masa modern dari 1955 sampai 2004 adalah kemajuan perusahaan Jepang bidang industri di Jepang pada masa modern terutama pada sektor industrinya, pada hakikatnya didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi Jepang merupakan hasil dari sumber daya manusia Jepang, bukan dari sumber daya alamnya, karena sesungguhnya Jepang miskin akan sumber daya alamnya. Jepang memiliki sumber daya manusia yang tangguh dan berkarakter berupa rakyat yang ulet, disiplin, mau kerja keras, suka meniru kemajuan negara-negara lain untuk menciptakan sendiri produk-produk yang lebih maju dan royal dalam penyediaan dana pemerintah atau masyarakat dan kerja sama antar negara untuk mendapatkan impor bahan baku dan proyek-proyek penelitian sehingga dapat menghasilkan kreasi baru dan menciptakan teknologi baru. Salah satu contohnya, Jepang merupakan produsen besi baja terbesar ketiga sesudah Uni Soviet dan Amerika Serikat serta merupakan produsen kapal-kapal laut yang dipesan oleh berbagai negara di dunia. Tak hanya itu, Jepang juga melakukan ekspor barang-barangnya seperti pesawat terbang, jet-turbo dan mobil ke berbagai negara.

Bentuk diskriminasi gender dalam perusahaan Jepang di bidang industri pada masa modern dari 1955 sampai 2004 adalah memaksakan kaum wanita untuk meninggalkan pekerjaan ketika mereka menikah, praktek pensiun yang dipaksakan pada usia muda (umumnya 25 tahun) yang khusus ditujukan kepada kaum wanita, serta “nasehat untuk pensiun” kepada kaum wanita yang telah menikah. Kemudian bentuk kasus diskriminasi lainnya seperti gerakan buruh yang timbul dari tenaga tertekan buruh wanita telah tampak juga di antara pegawai pemerintah di berbagai kantor wilayah, seperti juga pada perusahaan-perusahaan swasta pada umumnya. Kemudian kaum wanita juga sulit untuk mendapatkan cuti haid, cuti melahirkan dan izin istirahat untuk menyusui. Selain itu, dari pihak perusahaan sendiri tidak bersemangat memperjuangkan upah terhadap kaum pekerja wanita dan hal inilah yang menyebabkan status kaum pekerja wanita di perusahaan menjadi rendah.

Solusi pemerintah Jepang terhadap diskriminasi gender dalam perusahaan Jepang di bidang industri pada masa modern dari 1955 sampai 2004 adalah didirikan biro-biro perburuhan serta

kantor-kantor pengawasan di berbagai kota dan wilayah di seluruh negeri dan dibentuklah di lingkungan Kementerian Perburuhan sebuah Biro Perburuhan dan sebuah Biro Keselamatan dan Sanitasi dan juga Direktorat Urusan Wanita dan Pemuda dibentuk di lingkungan Kementerian Perburuhan, khusus untuk memperhatikan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan peraturan-peraturan bagi kaum wanita dan anak-anak di bawah umur dengan tujuan untuk membangkitkan kesadaran para pekerja sampingan akan kedudukannya sebagai seorang “pekerja”, juga mendorong serikat-serikat buruh untuk mempersatukan berbagai gerakan tersebut demi peningkatan upah yang sangat rendah dari para pekerja sampingan serta meningkatkan hak-hak kaum wanita.

